

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TERJADINYA KREDIT BERMASALAH

(Studi pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang Periode 2011-2013)

Nadifatul Fuadiyah
Dwiatmanto
Nila Firdausi Nuzula
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: nadifatulfuadiyah@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to evaluate the monitoring implementation of Work Capital Credit in PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha as the effort to reduce the occurrence of non performing loans. Method of research is descriptive with quantitative approach. Focus in the study Non Performing Loans Work Capital Credit at PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha and monitoring activities through preventive and repressive controls. Result of research indicates that the monitoring in PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha is using in preventive approach through the analysis of credit, the determination of ceiling, and the observation and the fostering of debtorless optimum. It causes of NPL rate of work capital credit at PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha which reach 7.9 % in 2011, 10.4% in 2012 and 8.1 % in 2013. Repressive monitoring by the bank has not been applied as the recovery action from problematic credit.

Keywords: *Work Capital Credit, Credit Monitoring, Non Performing Loans*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kolektibilitas kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dan mengetahui pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha sebagai upaya mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini difokuskan pada kredit bermasalah pada Kredit Modal Kerja PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dan Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dengan cara *preventive control* dan *repressive control*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan secara preventif pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dalam melakukan analisis kredit, menetapkan plafon, pemantauan serta pembinaan debitur kurang optimal. Hal tersebut menyebabkan tingkat NPL Kredit Modal Kerja pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha tahun 2011 mencapai 7,9%, pada tahun 2012 mencapai 10,4% dan pada tahun 2013 mencapai 8,1%. Selain itu, di dalam pelaksanaan pengawasan secara represif pihak bank belum menerapkan upaya *restructuring* sebagai tindakan penyelamatan kredit bermasalah.

Kata kunci: *Kredit Modal Kerja, Pengawasan Kredit, Kredit Bermasalah*

1. PENDAHULUAN

Modal merupakan salah satu penunjang guna tercapainya eksistensi kegiatan usaha. Pengaruh modal terhadap sebuah bisnis menjadi pondasi yang kuat untuk menjalankan berbagai aktifitas usahanya. Suatu perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Melalui laba tersebut perusahaan dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Namun, tidak selamanya laba dapat diandalkan. Hal ini disebabkan karena kondisi tertentu yang dialami perusahaan, seperti perusahaan mengalami kerugian atau tingkat penjualan tidak mencapai

target. Kondisi ini kemungkinan akan mengakibatkan modal perusahaan menjadi berkurang dan laba yang diperoleh tidak mencukupi sehingga keduanya tidak dapat diputar kembali menjadi persediaan barang dagang. Dalam situasi seperti ini, perusahaan dapat mengatasi permasalahannya dengan mendapatkan suntikan dana dari bank.

Suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kecenderungan kerugian yang timbul, dalam usaha perkreditan adalah akibat tingginya jumlah kredit bermasalah yang disebabkan oleh kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut diberikan.

Penyaluran kredit kepada nasabah mengandung risiko, salah satunya adalah tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan kepada nasabah karena tidak semua nasabah mampu mengembalikan kredit dengan baik dan tepat waktu. Umumnya kredit yang diberikan berakhir menjadi kredit yang bermasalah atau kredit macet atau istilah dalam perbankan disebut *NonPerforming Loans* (NPL).

Kredit bermasalah yang muncul tidak hanya mempengaruhi pendapatan atau keuntungan saja, tetapi juga akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Bank tidak lagi dapat dipercaya oleh masyarakat maka dapat diperkirakan bahwa bank tersebut tidak akan bertahan lama.

PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha merupakan salah satu lembaga keuangan mikro konvensional yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan keuangan. PD. BPR Tugu Artha memiliki fungsi melayani kredit, deposito maupun tabungan dari masyarakat. Jenis kredit yang ditawarkan PD. BPR Tugu Artha meliputi kredit konsumtif (PNS) dan kredit modal kerja. Dalam kegiatan penyaluran kredit modal kerjanya PD. BPR Tugu Artha memiliki risiko kemacetan kredit yang meningkat, hal ini dikarenakan pemberian kredit tersebut tidak membuat usaha nasabahnya menjadi lebih berkembang sehingga mengakibatkan pendapatan debitur tidak meningkat.

Pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha sering kali menghadapi resiko berupa kredit bermasalah yang mengakibatkan terjadinya tunggakan kredit. Tunggakan kredit tersebut jika tidak segera diatasi akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan bank dan akan mengakibatkan

aktivitas bank menjadi terganggu. Bertambahnya jumlah penyaluran kredit, memunculkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah kredit bermasalah yang meningkat setiap tahunnya.

Selama tahun 2011 s/d 2013 PD. BPR Tugu Artha mampu meningkatkan pemberian kredit untuk masyarakat. Pada tahun 2011-2012 pemberian kredit di PD. BPR Tugu Artha mengalami kenaikan sebesar 32,8% yaitu dari total kredit Rp 1.153.200.000,- menjadi Rp 1.531.000.000,-. Sedangkan di tahun 2013 pemberian kredit meningkat sebesar 19,4% dari total kredit pada tahun 2012 yang berjumlah Rp 1.531.000.000,- menjadi Rp 1.828.500.000,-. Namun peningkatan jumlah realisasi kredit tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah selama tahun 2011 hingga tahun 2013.

Kredit bermasalah yang terjadi pada PD. BPR Tugu Artha menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 sebesar 38,1% yaitu yang semula Rp 35.951.350,- menjadi Rp 49.665.750,- dan pada tahun 2012 hingga tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 12% dari yang semula Rp 49.665.750,- menjadi Rp 55.627.500,-. Sedangkan tingkat kolektibilitas kredit yang Diragukan (D) juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan drastis pada tahun 2011 sampai tahun 2012 sebesar 148,5% yaitu dari Rp 25.940.560,- menjadi Rp 64.450.775,- sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan 2013 juga masih mengalami kenaikan sebesar 23,3% yaitu dari yang semula Rp 64.450.775,- menjadi Rp 79.450.770,-. Klasifikasi Macet (M) pada tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dari yang semula Rp 29.649.040,- menjadi Rp 45.283.975,- atau naik sebesar 52,7%, namun pada tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari yang semula Rp 45.283.975,- menjadi Rp 14.461.830,- atau turun sebesar 68,1%. Meskipun dari klasifikasi Macet (M) pada tahun 2012 hingga 2013 mengalami penurunan akan tetapi keadaan kolektibilitas Kurang Lancar (KL) dan Diragukan (D) pada tahun sebelumnya selalu meningkat drastis. Padahal, PD. BPR Tugu Artha sudah menerapkan penilaian berdasarkan syarat-syarat teknis pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya kinerja perusahaan, sehingga diperlukan suatu pelaksanaan pemberian kredit yang baik pada PD. BPR Tugu Artha agar kredit bermasalah yang terjadi dapat dikurangi atau dicegah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Mengurangi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha periode 2011-2013)**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkreditan

Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak debitur, sesuai jangka waktu pengembalian dan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang telah ditentukan.

2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Hasibuan (2007:88), tujuan dari pemberian suatu kredit antara lain untuk :

- a. Memperoleh pendapat bank dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abdullah (2005:85) kredit mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang.
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dapat diartikan kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan alat pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel.
- 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang dapat diartikan dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

- 4) Kredit dapat menjadi salah satu alat stabilisasi ekonomi dapat diartikan bila keadaan ekonomi kurang sehat, maka kebijakan diarahkan kepada usaha pengeendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
- 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat dapat diartikan bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kurang mampunya para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

2.3 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi anatara lain (Kasmir, 2007:99) :

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit Produktif
 - 2) Kredit Konsumtif
 - 3) Kredit Perdagangan
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit Jangka Pendek
 - 2) Kredit jangka Menengah
 - 3) Kredit Jangka Panjang
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan
 - 2) Kredit tanpa jaminan
- e. Dilihat dari sektor usaha
 - 1) Kredit pertanian
 - 2) Kredit peternakan
 - 3) Kredit industri
 - 4) Kredit pertambangan
 - 5) Kredit pendidikan
 - 6) Kredit profesi
 - 7) Kredit perumahan
 - 8) Dan sektor-sektor lainnya.

2.4 Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menambah modal kerja. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:253) “modal kerja tersebut menunjukkan sejumlah dana yang tertanam pada aktiva lancar perusahaan”. Sedangkan, menurut Bastian dan Suhardjono (2006:251) “untuk kredit

modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000 dan usaha menengah dengan plafon kredit diatas Rp. 500.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000”.

2.5 Prinsip Penilaian Kredit

Kasmir (2006:117) menyebutkan “terdapat kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, yaitu dengan dilakukannya analisis 5C, 7P dan 3R”. Penilaian dengan prinsip analisis 5C, 7P dan 3R sebagai berikut:

- a. Prinsip 5C
 - 1) *Character*
 - 2) *Capacity*
 - 3) *Capital*
 - 4) *Collateral*
 - 5) *Condition of Economy*
- b. Prinsip 7P
 - 1) *Personality*
 - 2) *Party*
 - 3) *Purpose*
 - 4) *Prospect*
 - 5) *Payment*
 - 6) *Profitability*
 - 7) *Protection*
- c. Prinsip 3R
 - 1) *Return* (hasil yang dicapai)
 - 2) *Repayment* (pembayaran kembali)
 - 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

2.6 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas atau penggolongan kredit merupakan tingkat ketepatan pembayaran kembali kredit atau angsuran kredit dan bunga oleh nasabah. Menurut Kasmir (2012:130) kolektibilitas penggolongan kredit meliputi:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

2.7 Pengawasan Kredit

Menurut Muljono (2001:460) pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong

dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Bank melakukan pengawasan kredit tidak hanya ketika kredit tersebut diberikan kepada debitur saja, tetapi juga sejak sebelum kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dikembalikan oleh debitur. Tahap pengawasan ini pada umumnya dimulai dari pencairan kredit dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi oleh debitur.

2.8 Kredit Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2002:3) “kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya”.

2.9 Non Performing Loans (NPL)

Menurut Dahlan (2004 : 174) yang merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. Bank Indonesia menetapkan besarnya standar maksimum NPL yaitu sebesar 5%. NPL timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya.

Kredit bermasalah (*Non Performing Loans/ NPL*) dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2007:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Bersifat kuantitatif karena

menggunakan data yang berbentuk angka dan melakukan perhitungan menggunakan rumus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2007:12).

Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data kolektibilitas kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja yang terjadi selama periode 2011-2013 pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha, berdasarkan rumus :

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

2. Menganalisis Pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha sebagai upaya mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

a. *Preventive Control of Credit*

- 1) Penentuan plafon kredit
- 2) Pemantauan debitur
- 3) Pembinaan debitur

b. *Repressive Control of Credit*

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*
- 4) *Liquidation*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Kolektibilitas Kredit Bermasalah pada Kredit Modal Kerja Periode 2011-2013 PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha

Kolektibilitas kredit bermasalah pada PD. BPR Tugu Artha terdiri dari kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Masing-masing kolektibilitas tersebut mempunyai karakteristik penggolongan tunggakan kredit, yaitu Kurang Lancar (KL) menunggak mulai 30 s/d 90 hari, Diragukan (D) menunggak mulai 90 s/d 180 hari, dan Macet (M) menunggak > 180 hari.

Tabel 1. Laporan Kredit Bermasalah pada Kredit Modal Kerja PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Periode 2011 s/d 2013

Data Kolektibilitas Kredit	2011 (Rupiah)	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)
Kurang Lancar (30 s/d 90 hr)	35.951.350	49.665.750	55.627.500
Diragukan (90 s/d 180 hr)	25.940.560	64.450.775	79.450.770
Macet (> 180 hr)	29.649.040	45.283.975	14.461.830
Total	91.540.950	159.400.500	149.540.100
NPL (%)	7,9%	10,4%	8,1%

Pada tahun 2011 total Kredit Modal Kerja yang disalurkan sebesar Rp 1.153.200.000,- dengan total Kredit Modal Kerja bermasalah Rp 91.540.950,- serta NPL sebesar 7,9%. Pada tahun 2012 terdapat kenaikan yaitu total Kredit Modal Kerja yang disalurkan sebesar Rp 1.531.000.000,- diikuti dengan pertumbuhan Kredit Modal Kerja bermasalah sebesar Rp 159.400.500,- serta NPL sebesar 10,4%. Kenaikan NPL 20,2% dari tahun 2011 ke tahun 2012 disebabkan karena pengawasan yang dilakukan PD. BPR Tugu Artha belum optimal. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu total Kredit Modal Kerja yang disalurkan sebesar Rp 1.828.500.000,- dan diikuti dengan penurunan Kredit Modal Kerja bermasalah sebesar Rp 149.540.100,- serta penurunan NPL sebesar 8,1%. Penurunan NPL sebesar 2,3% dari tahun 2012 ke tahun 2013 sudah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha sedikit membaik. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha belum sepenuhnya optimal ditunjukkan dengan penurunan NPL yang masih diatas batas yang telah ditetapkan BI yaitu <5%.

Berdasarkan analisis tersebut besarnya NPL Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha tiap tahunnya berada di atas batas aman atau melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pengawasan kredit yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja PD. BPR Tugu Artha dalam menyalurkan kredit belum sepenuhnya optimal, perlu peningkatan pengawasan untuk dapat mengurangi besarnya NPL agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

4.2 Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja secara *Preventive*

Pelaksanaan pengawasan kredit secara *preventive control of credit* merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Berikut ini adalah analisis tentang pengawasan preventif Kredit Modal Kerja :

1) Penentuan Plafond Kredit

PD. BPR Tugu Artha dalam melakukan penetapan terhadap plafon kredit tidak menerapkan analisis 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) secara keseluruhan, hal ini dikarenakan analisis 7P dan 3R sudah diterapkan melalui analisis 5C. Analisis 7P yang diterapkan oleh PD. BPR Tugu Artha hanya meliputi *personality* (kepribadian), *prospect* (harapan), *payment* (pembayaran), dan *profitability* (keuntungan). Sedangkan analisis 3R yang diterapkan yaitu *Repayment* (kemampuan pembayaran kembali). Terlihat bahwa analisis pemberian kredit untuk menetapkan plafon kredit yang diterapkan oleh PD. BPR Tugu Artha kurang efektif, hal ini dikarenakan belum semua analisis 7P dan 3R diterapkan oleh pihak bank.

Kelemahan juga terjadi pada tahap awal pendaftaran Kredit Modal Kerja calon debitur yang memiliki saudara/teman seorang staff di BPR Tugu Artha cenderung hanya menitipkan berkas permohonan kredit pada staff tersebut dan tidak dilakukan inspeksi *on the spot* untuk mengecek kebenaran data tersebut, ini menyebabkan calon debitur tersebut memberikan data-data fiktif karena mereka beranggapan tidak akan dilakukan inspeksi *on the spot* oleh petugas BPR Tugu Artha dan akhirnya debitur tersebut akan menyalahgunakan penggunaan kredit yang telah disalurkan. Hal ini apabila terus dilakukan akan mengakibatkan kerugian besar pada pihak bank karena pihak bank kurang teliti dan terlalu percaya dalam mengecek kelengkapan dan keaslian data calon debitur tersebut, kemungkinan terjadinya tunggakan kredit cukup besar karena debitur tersebut bisa menyalahgunakan penggunaan kredit dan melarikan diri kemudian pihak bank tidak bisa mengatasinya sebab data-data yang diberikan fiktif. Sebaiknya dalam mengatasi permasalahan ini pihak bank menetapkan

peraturan secara tegas pada setiap staff PD. BPR Tugu Artha untuk tidak memperbolehkan lagi melakukan penitipan berkas permohonan kredit milik orang lain agar pihak bank tidak mengalami kerugian yang besar.

2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur yang dilakukan PD. BPR Tugu Artha tampak masih terdapat kekurangan didalamnya. Debitur tidak menyusun laporan keuangan secara berkala sebab tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan tersebut dan skala usahanya masih kecil sehingga staff kredit yang datang langsung ke tempat usaha debitur untuk mencatat perkembangan usahanya. Sebaiknya pihak bank mendidik debitur untuk bisa membuat laporan tersebut sendiri meskipun skala usahanya masih kecil dan mewajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut secara berkala kepada bank, sebab dari laporan keuangan tersebut nantinya akan dapat diketahui perkembangan usaha, profitabilitas serta kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur yang dilakukan PD. BPR Tugu Artha sudah bisa dikatakan baik yaitu dilakukan dengan memberi peringatan melalui telepon kepada debitur yang akan memasuki jatuh tempo untuk melakukan angsuran pinjaman dan memberikan solusi kepada debitur yang merasa tidak mempunyai waktu datang ke kantor BPR Tugu Artha untuk membayar angsuran pinjaman dengan cara petugas lapangan dari bank yang akan mendatangi tempat usaha debitur untuk mengambil angsuran pinjaman tersebut dan berkonsultasi mengenai perkembangan usaha debitur yang bersangkutan. Dengan demikian pihak bank dapat mendeteksi secara dini permasalahan yang mungkin akan timbul untuk usaha debitur maupun untuk bank di kemudian hari serta membantu mencari jalan keluarnya.

4.3 Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja secara *Repressive*

Pengawasan *repressive control of credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring*, dan *liquidation*. Pengawasan represif yang dilakukan PD. BPR Tugu Artha antara lain :

- 1) *Reschedulling* dengan cara:
 - a) Memperpanjang jangka waktu kredit, yaitu debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit
 - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, yaitu debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.
 - c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
- 2) *Reconditioning*, dilakukan dengan cara mengadakan perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti:
 - a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga debitur untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Di samping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan debitur. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.
 - b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada debitur tidak dilaksanakan sampai debitur mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
 - c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi usaha debitur memang menunjukkan laba yang memungkinkan untuk membayar bunga.
 - d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal ini debitur memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usahanya hanya mencapai tingkat pengembalian pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- 3) *Liquidation* dengan cara:
Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-

benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha debitur sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Kelemahan terlihat dari pihak bank tidak menggunakan upaya penyelamatan lain yaitu *Restructuring*. *Restructuring* dilakukan kepada debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjamannya dan betul-betul sedang membutuhkan tambahan dana serta usaha yang dibiayai memang masih layak dan diperkirakan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit mendapatkan penambahan modal serta nilai agunan masih dapat mencakup kredit. Harapannya ialah debitur dapat mengembangkan usahanya agar stabil dan dapat kembali melakukan pembayaran angsuran serta kredit yang diberikan dapat terbayar lunas.

Jika upaya *Restructuring* tersebut diterapkan oleh PD. BPR Tugu Artha, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah yang terjadi dari tahun ke tahun agar kredit yang disalurkan dapat benar-benar kembali dan dibayar lunas sesuai kesepakatan pihak bank dengan debitur, sehingga PD. BPR Tugu Artha tidak mengalami kerugian dan dapat mengurangi *Non Performing Loans* (NPL) ditahun-tahun berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PD. BPR Tugu Artha, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Data kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPL) pada PD. BPR Tugu Artha menunjukkan pada tahun 2011 mencapai 7,9%, kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 10,4%, sedangkan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan mencapai 8,1%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia batas maksimum nilai NPL 5%, jika >5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Dapat dilihat untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 NPL PD. BPR Tugu Artha di atas 5%, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat dan perlu pengawasan yang semakin ketat.
2. Pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha sebagai upaya mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
 - a) Pengawasan preventif yang selama ini telah dilakukan kurang maksimal, terdapat

banyak kelemahan, diantaranya: analisis penilaian 7P dan 3R tidak diterapkan secara keseluruhan, serta adanya prosedur yang tidak tepat dalam menerima debitur baru.

- b) Pengawasan represif pada BPR Tugu Artha di dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah juga terdapat kelemahan yaitu belum menerapkan penyelamatan *restructuring* (penataan kembali)

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan PD. BPR Tugu Artha, sebagai berikut :

1. Melihat relatif besarnya NPL BPR Tugu Artha yang di atas ketentuan yang diberikan Bank Indonesia yaitu di atas 5%, maka bank perlu meningkatkan pengawasan kredit secara ketat terhadap debitur sehingga dapat mengurangi besarnya NPL (*Non Performing Loans*) di tahun berikutnya.
2. Pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang seharusnya dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha sebagai upaya mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
 - a) Pada proses pengawasan preventif yang selama ini telah dilakukan disarankan: sebaiknya pihak bank juga menerapkan analisis 7P dan 3R secara keseluruhan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Selain itu, untuk setiap calon debitur lama ataupun baru selalu dilakukan prosedur yang tepat yaitu melarang aturan penitipan berkas lewat pegawai bank dengan alasan apapun.
 - b) Pengawasan represif yang dilakukan BPR Tugu Artha seharusnya juga menggunakan upaya penyelamatan lain yaitu *Restructuring* dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjamannya dan betul-betul sedang membutuhkan tambahan dana serta usaha yang dibiayai memang masih layak. Harapannya supaya debitur dapat mengembangkan usahanya agar stabil dan dapat kembali melakukan pembayaran angsuran serta kredit yang diberikan dapat terbayar lunas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra dan Suharjono, 2006. *Akuntansi Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, H. Malayu. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Kuncoro, Mundrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta dan Makassar: BPFE.
- Mahmoeddin, Drs. H.As., 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Sinar Multi press.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.